

ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO,
KABUPATEN PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN
MENUJU OTONOMI DAERAH

SKRIPSI



Oleh :

ARUM MARETA KUSUMA DEWI
0911010024 / FE / IE

Kepada

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2013

ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO,
KABUPATEN PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN
MENUJU OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan



Oleh :

ARUM MARETA KUSUMA DEWI
0911010024 / FE / IE

Kepada

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2013

SKRIPSI

ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN
PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN MENUJU OTONOMI DAERAH

Disusun oleh :

ARUM MARETA KUSUMA DEWI
0911010024 / FE / IE

telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 31 Mei 2013

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
Ketua

Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT

Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT

Sekretaris

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP

Anggota

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur. MM

NIP. 19630924 198903 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ Analisis Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun Menuju Otonomi Daerah ”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada. Berkat bantuan dan bimbingan yang diterima dari Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT selaku Dosen Pembimbing Utama, peneliti sangat berterima kasih karena Beliau dengan sabar telah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan bantuan berupa sarana fasilitas dan perijinan guna pelaksanaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak/ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik bagi peneliti.
5. Almarhum papa Suryadi dan papa Brahma serta mamaku tercinta yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan buatku.
6. Kakak-kakakku Andri, Cristin, Hendra, Lia serta saudara-saudaraku yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan membantuku.
7. Sahabatku Sherly, Supri, Cici, Akbar, Anik, Heri dan semua angkatan 2009 Program Studi Ekonomi Pembangunan serta sahabat-sahabatku semua yang tak mungkin saya sebutkan disini, terima kasih atas motivasinya.

Semoga Allah SWT berkenan dan memberikan balasan, limpahan rahmat, serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFRAT GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Otonomi Daerah	9
2.2.2 Desentralisasi Fiskal	13
2.2.2.1 Indikator Desentralisasi Fiskal	15
2.2.3 Sumber Penerimaan Pemerintah	18
2.2.4 Sumber Pendapatan Daerah	23
2.2.4.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26
2.2.4.2 Sumbangan Daerah	26

2.2.4.3 Dana Alokasi Umum	26
2.2.4.4 Dana Alokasi Khusus	27
2.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah	27
2.2.6 Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	29
2.2.7 Hubungan APBN dan APBD	31
2.2.7.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	32
2.2.7.2 Penerimaan Rutin	32
2.2.7.3 Pengeluaran Rutin	33
2.3 Kerangka Pikir	35
2.4 Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.2.1 Jenis Data	38
3.2.2 Sumber Data	38
3.3 Teknik Analisis dan Pengolahan Data	38
3.3.1 Indeks Desentralisasi Fiskal	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum Dari Provinsi Jawa Timur	40
4.1.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Sidoarjo	41
4.1.1.2 Kondisi Umum Kabupaten Pacitan	43
4.1.2.3 Kondisi Umum Kabupaten Madiun	44

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	17
TABEL 2	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah..	30
TABEL 3	Contoh Anggaran Pendapatan Daerah	34
TABEL 4	Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2011.	46
TABEL 5	Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2011..	47
TABEL 6	Penerimaan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2010-2011..	48
TABEL 7	Indeks PAD terhadap TPD, Indeks BHPBP terhadap TPD, Indeks SB terhadap TPD tahun 2010	50
TABEL 8	Indeks PAD terhadap TPD, Indeks BHPBP terhadap TPD, Indeks SB terhadap TPD tahun 2011	52
TABEL 9	Hasil Perhitungan Kontribusi PAD dan Kontribusi BHPBP terhadap Kontribusi SB untuk mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2010.....	53
TABEL 10	Hasil Perhitungan Kontribusi PAD dan Kontribusi BHPBP terhadap Kontribusi SB untuk mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2011	54
TABEL 11	Rata-rata Indeks Desentralisasi Fiskal terhadap Hasil Perhitungan untuk Mengetahui Tingkat Kemandirian Daerah dari tahun 2010-2011	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir	35
----------	----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2010-2011
Lampiran 2	Perhitungan Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal tahun 2010
Lampiran 3	Perhitungan Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal tahun 2011
Lampiran 4	Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan membandingkan PAD terhadap TPD dan BHPBP terhadap TPD tahun 2010-2011
Lampiran 5	Sektor PDRB di Kabupaten Sidoarjo
Lampiran 6	Sektor PDRB di Kabupaten Pacitan
Lampiran 7	Sektor PDRB di Kabupaten Madiun

**“ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN PACITAN, DAN
KABUPATEN MADIUN MENUJU OTONOMI DAERAH”**

ABSTRAKSI

Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat dan daerah selayaknya Jawa Timur mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat .

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah pada Daerah Sidoarjo, Pacitan, Madiun. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat mengetahui di kabupaten Sidoarjo, Pacitan dan Madiun memiliki kemandirian fiskal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal rata-rata menunjukan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di 3 kabupaten adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif sehingga dapat di katakan selama periode 2010-2011 penelitian 3 Kabupaten tersebut belum mampu membawa daerahnya untuk mandiri.

Kata kunci: Indeks Pendapatan Asli Daerah, Indeks Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Indeks Sumbangan Bantuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang diharapkan terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah adalah menjadikan

daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Sebagai pelaksana utama pembangunan di daerahnya, daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pemerintah Daerah bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundangan.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan

sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Sumber keuangan daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Asli Daerah
2. Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman Daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat. (Anonim,2012)

1,2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal pada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun?
2. Apakah ada perbedaan kemandirian fiskal antar Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal pada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui perbedaan kemandirian fiskal antar Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi dan sebagai sambungan pemikiran terhadap pembuat kebijakan dalam hal pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun dalam menetapkan kebijakan dalam ketenagakerjaan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja bagi porsi yang tepat dalam memilih alternative.
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis atau peneliti yang mengambil topik pendapatan asli daerah yang terkait dengan Indeks Desentralisasi Fiskal.
3. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pembendaharaan literature perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur.